BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Kab. Buol, dikaji dari: a). Perencanaan, b). Pelaksanaan, c). Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan namun belum optimal, ketidakoptimalan pelaksanaan kebijakan pada aspek perencanaan disebabkan oleh Dinas Teknik yang merancang dan mengeluarkan kebijakan hewan ternak tidak memahami tugas pokok dan fungsinya dan justru di limpahkan pada masing-masing kecamatan untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak. selain itu, pada aspek pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala yakni kerjasama lintas sektor yang kurang berjalan dengan baik khususnya dari Dinas Teknik yang mengeluarkan Peraturan Daerah, selain itu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dilakukan penertiban hewan ternak, serta tidak adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten ke tingkat kecamatan sehinga masih banyak dijumpai hewan ternak yang masih berkeliran di tempat umum.

2. Faktor penentu implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Kab. Buol. dikaji dari: a). Standar dan sasaran kebijakan, b). Sumber daya, c). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d).

karakteristik organisasi agen pelaksana, e). Sikap para pelaksana, f). Konsisi sosial ekonomi telah dilaksanakan namun masih belum optimal dari standar dan sasaran kebijakan yang belum sesuai dengan isi kebijakan karena masih terdapat ketidakesuaian pemberian denda kepada pemilik ternak yang melanggar sebagaimana tertuang dalam isi kebijakan, minimnya sumber daya manusia terkait tenaga Penyidik PNS (PPNS) sehingga prosedur penindakan hanya berhenti di tahap penerapan sanksi saja, dan agen pelaksana ditingkat desa pun hanya hanya memiliki latar belakang pendidikan SD, sehingga apa yang diintsruksikan atasan kurang dapat dipahami oleh agen pelaksana, selain itu, pada aspek komunikasi, koordinasi antar Dinas terkait masih kurang khususunya ditingkat Kabupaten yang kurang berjalan dengan baik sehingga unsur kejelasan dan isi pesan dari kebijakan penertiban hewan ternak masih kurang memiliki kejelasan, sikap para pelaksana yang masih kurang sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ini karena daya dukung anggaran yang masih minim dalam memberikan honor kepada tim pelaksana kebijakan penertiban hewan ternak tersebut

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengusulkan beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksnaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol, maka tingkat sosialisasi dan koordinasi perlu ditingkatkan antar semua Dinas yang terkait, baik ditingkat Kabupaten sampai ditingkat

Kecamatan, sehingga apa yang menjadi permasalahan di lapangan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan isi kebijakan, ego sektoral yang masih perlu dihilangkan dimasing-masing lini sektor.

2. Agar implementasi kebijakan penertiban hewan ternak dapat terlaksana/terimplementasi sesuai dengan arah kebijakan, maka perlu penyediaan anggran yang memadai, Dinas Teknik perlu mengupayakan penyediaan anggaran yang memadai disemua tingkatan, sebab permasalahan penertiban hewan ternak dilaksanakan disemua daerah dan disemua tingkatan, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup, sebab tanpa adanya anggaran, maka kebijakan penertiban hewan ternak tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukkan bagi Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali isi kebijakan sehingga lebih sesuai dengan kondisi Kabupaten Buol, seperti dalam hal penerapan sanksi dan penambahan personil dalam hal penyidikan, sebab salah satu permasalahan tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan diakibatkan oleh lemahnya penegakkan hukum, dan kurangnya sumber daya serta kurangyna peran Dinas Teknis khususnya ditingkat Kabupaten sebagai pelopor dan perancang kebijakan tersebut, selain itu, kebijakan penertiban hewan ternak ini pula merupakan kebijakan yang telah lama di galangkan namun sampai dengan saat ini belum optimal, sehingga pemerintah Kabupaten Buol perlu memberi perhatian khusus mengenai permasalahan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol.

4. Sebagai bahan masukkan bagi pemerintah daerah, maka pemerintah desa perlu mengusulkan untuk membuat regulasi Perdes tentang penertiban hewan ternak sebagai salah satu upaya dan dasar hukum untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan penertiban hewan ternak di tingkat desa

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan*: *Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

_____. 2012. *Analisis Kebijakan*: *Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

_____2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Agustino. 2014. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

_____2008. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi.Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

Drs. Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. *Unimal Press. ISBN: 978-602-464-061-3*

Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Edisi Kedua. Yogyakarta: Gaja Mada. University Press.

Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.

Grindle, Merilee S. 1980 *Politics and Policy Implementations in the Third Word*, New jersey: Princetown University Press.

Hamidjoyo. 2007. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Yogyakarta: UGM Press.

Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara

----------. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Kadji Yulianto, M.Si. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.* Gorontalo. UNG Press

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2007. *Manajemen Pemasaran*. (Ed. Ke-12). Jilid 1dan2. Terjemahan: Benyamin Molan. Jakarta: PT. Indeks.

Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. *Unimal Press. ISBN: 978-602-464-061-3*

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan* Publik. Bandung: Alfa Beta.

Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan. Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama

Sahya Anggara. 2018. *Kebijakan Publik. Cetakan ke 2.* ISBN: 978-979-076-487-3. Bandung: CV. Pustaka

Subarsono, AG. *2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan. Aplikasi*. Cetakan VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____ 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Sutisna, Oteng. 1983. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek. Profesional*. Bandung: angkasa.

Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Tahir Arifin, M.Si. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Usman Husaini. 2013. *Manajemen Teori,Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

_____. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta

_____. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita

_____. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal

Arif, Panungkul. (2015). Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 96-102. ISSN: 2302-2019*

Banhazi, T. M., & Black, J. L. (2009). Precision Livestock Farming: A Suite of Electronic Systems to Ensure the Application of Best Practice Management on Livestock Farms. *Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering*, *7*(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/14488388.2009.11464794.

Casey, N. H. (2010). Integrated higher learning-An investment in intellectual capital for livestock production. *Livestock Science*, *130*(1–3), 83–94. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2010.02.013.

Dasril Muhammad. 2017. Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Penertiban Ternak). *Jurnal Dialektika Volume 2,Nomor 1, Februari 2017*

Gerber, P., Key, N., Portet, F., & Steinfeld, H. (2010). Policy options in addressing livestock's contribution to climate change. *Animal*, *4*(3), 393–406. https://doi.org/10.1017/S1751731110000133

Hoffmann, I. (2011). Livestock biodiversity and sustainability. *Livestock Science*, *139*(1–2), 69–79. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2011.03.016

Bunker, D. R. (2010). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB*. *1*(1), 1–11.

Indrayani dan Malau. 2019. Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik: Vol. 3 No. 1 Tahun 2019*

Kalyan Babu, K., Praveena, P. L. R. J., Sailaja, V., & Chandrika, V. (2020). Construction of Knowledge Test to Measure the Level of Knowledge of Farmers on Climate Resilient Technologies. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, *9*(4), 2311–2319. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2020.904.277

Matlou, R., Bahta, Y. T., Owusu-Sekyere, E., & Jordaan, H. (2021). Impact of agricultural drought resilience on the welfare of smallholder livestock farming households in the northern cape province of south africa. *Land*, *10*(6). https://doi.org/10.3390/land10060562

Rusdin M. Syukur. 2020. Kebijakan Penertiban Ternak; Tantangan Penerapan Di Kecamatan Palasa. *Jurnal Administrator-STIA Pembangunan Vol.1 No. 1, Juli 2020. ISSN: 1858-084X*

Suhendra. 2019. Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur). *Tesis.* UMA: Medan

Nurlizah Ulfah 2017. Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Lingga). *JOM FISIP Vol. 4 No. 1- Februari 2017*

Weibel, M., Badano, J., & Rintoul, I. (2014). Technological Evolution of Hormone Delivery Systems for Estrous Synchronization in Cattle. *International Journal of Livestock Research*, *4*(1), 20. https://doi.org/10.5455/ijlr.20131025105112

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistika Kabupaten Buol. 2021. *Kabupaten Buol dalam Angka. 2021*. Palu: UD. RIO. ISSN: 2549-242X

Kecamatan Gadung dalam Angka, 2021

Kecamatan Bunobogu dalam Angka, 2021

Kecamatan Bokat dalam Angka, 2021

Kantor Camat Kecamatan Gadung. 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Buol No 8 Tahun 2017. *Tentang Penertiban Ternak*

Peraturan Bupati Buol No 32 Tahun 2018. *Tentang Penertiban Ternak*